



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

PAPER PRESENTATION

Intra household priority for employment opportunity: a challenge for rural women despite gender indiscrimination

A case study from Banyuwangi, East Java

@ **Victoria Faggidae**

Program and Research Manager Prakarsa

Presented in "National Symposium on Village Innovation
of Village Independence and Women Empowerment"
by IRE-ACCESS AusAid Phase II in Jakarta

April 2013

Intra household priority for employment opportunity: a challenge for rural women despite gender indiscrimination¹

A case study from Banyuwangi, East Java

'Women and men without jobs or livelihoods really don't care if their economies grow at 3, 5 or 10 per cent a year, if such growth leaves them behind and without protection. They do care whether their leaders and their societies promote policies to provide jobs and justice, bread and dignity, and freedom to voice their needs, their hopes and their dreams...' (Juan Somavia)²

Abstract

The poverty rate of rural population in Indonesia has always been higher than the urban poverty rate, despite the high national economic growth and reduced national poverty rate. This trend can also be observed for poverty severity and poverty depth which is due to lack of assets, skills and working opportunities for rural population, among others. Female population in particular, must deal with poverty more than their male counterparts. If poverty is defined as deprivation of capabilities and the absence of freedom to choose whichever kind of life an individual is aspired to, then women suffer more because they have less option to access employment in villages. This paper aims to explore how typical households in small villages in an East Java district prioritise the household (HH) members' access to health, education, job opportunity and inheritance. This paper is written based on parts of the findings from a household socio-economic and public health survey in 5 villages in *Pesanggrahan* sub district, *Banyuwangi*, East Java, conducted in late 2011. The findings reveals that in general, male and female HH members are given equal opportunity in terms of access to decision making process within the household, education, inheritance and even more in terms of access to health. Nonetheless, when it comes to access to jobs, priorities are given to the male HH members. Working opportunities are indeed rare, and traditional jobs are dwindling and become more vulnerable in the Indonesian villages nowadays. Competition to enter employment is tougher; therefore while the respondents perceive women as equal to men in many other life aspects, they still see men as the ones who must be the breadwinner. This can be seen as more pressure to men, but it also epitomise the fact that in the society that has no longer practised discrimination against women, less options are available for women to exercise their right to work. As a result, women who lacking options to enter local job market must look for options beyond their village. They are most likely travel abroad to work as migrant domestic workers, and encountering risks. One important lesson drawn is that labour intensive and decent job creation –in or off-farm in rural areas, must be the priority of Indonesian government policies if it aims to achieve a more quality growth and more equal development in urban and rural areas, for men and women.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan menggembungnya pendapatan per kapita, produk domestik bruto, cadangan devisa maupun investasi asing ke Indonesia mendatangkan banyak pujian dunia internasional, namun juga menumbuhkan sinisme publik karena indikator-indikator ekonomi makro tersebut tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin, dan terutama mereka yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan: mereka yang berada di pedesaan.

Penduduk desa di Indonesia merupakan kelompok warga negara yang mengalami deprivasi dalam berbagai hal, yang jelas tercermin dari berbagai indikator kemiskinan. Persentase penduduk miskin kota adalah sebesar 8,60% sementara desa mencapai 14,70% atau sekitar 18

¹ Penulis: Victoria Fanggalda (vfanggalda@theprakarsa.org), peneliti di Perkumpulan Prakarsa, Jakarta. Paper ini dipresentasikan dalam acara “Simposium Nasional Inovasi Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Perempuan” oleh IRE-ACCESS Tahap II di Jakarta, 18-19 April 2013.

² Mantan Direktur International Labour Organisation (ILO), kutipan dari buku “*Righting the Balance, Putting Social Justice First*” (forthcoming, 2013).

juta penduduk. Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,48% di kota dan 2.42% di desa, begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,36% di kota dan 0,61% di desa.

Seiring dengan pembangunan yang makin berorientasi kepada sektor jasa dan perdagangan serta menafikan sektor pertanian, pekerjaan di sektor pertanian (termasuk perikanan, kehutanan dsb) pun makin langka, dan jika ada pun makin tidak diminati penduduk karena penghasilan yang makin tidak pasti dari sektor-sektor tersebut sementara kebutuhan hidup makin meningkat. Akibatnya ialah urbanisasi dan penuaan desa karena ditinggal oleh populasi produktifnya yang bermigrasi ke luar desa. Keterbatasan ketersediaan lapangan kerja di pedesaan ini berimbas kepada baik laki-laki sebagai pencari nafkah tradisional di konteks desa, namun juga terutama kepada kaum perempuan.

Secara umum data yang ada memang menunjukkan bahwa baik di kota maupun di desa, proporsi perempuan miskin selalu lebih tinggi daripada laki-laki. Dengan menggunakan perhitungan MPI (Multidimensional Poverty Index)³, didapati hasil yang cukup mengejutkan, dimana perempuan di desa dua kali sampai hampir tiga kali lipat lebih miskin daripada laki-laki di desa. Bahkan di kota, di mana kesenjangan lebih tinggi lagi, persentase perempuan miskin rata-rata hampir mencapai lima kali lipat daripada laki-laki (lihat Tabel 1).

Tabel 1

Proporsi kemiskinan di kota dan desa (MPI)

Keterangan	2008		2010	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Persentase kemiskinan di desa	23,78	61,32	26,99	64,42
Persentase kemiskinan di kota	7,75	35,01	9,48	44,46

Sumber: Prakarsa (forthcoming), diolah dari hasil SUSENAS

Sedangkan untuk isu ketenagakerjaan, laki-laki masih mendominasi dunia kerja, dengan rata-rata selisih proporsi laki-laki dan perempuan yang aktif secara ekonomi/bekerja mencapai lebih dari 30% setiap tahunnya. Untuk pekerjaan yang tidak dihargai secara ekonomi seperti mengurus rumah tangga, rata-rata selisihnya mencapai lebih dari 35% (lihat Tabel 2).

Tabel 2

Penduduk berumur 15 tahun keatas berdasarkan aktifitas minggu lalu

Penduduk umur produktif	Aktifitas minggu lalu	Jenis kelamin					
		Perempuan			Laki-laki		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Aktif secara ekonomi	Bekerja	46.68	47.24	48.44	77.37	78.61	79.32
	Tidak bekerja	4.32	4.52	3.99	6.28	5.15	4.97
Tidak aktif sec ekonomi	Bersekolah	7.94	8.02	7.54	8.37	8.26	7.72
	Mengurus rumah tangga	37.35	36.43	36.32	1.83	1.81	1.91
	Lainnya	3.71	3.78	3.71	6.15	6.17	6.07

Sumber: SAKERNAS BPS 2009-2011 (Agustus)

³ MPI menggunakan 10 indicators untuk mengukur kemiskinan di 3 dimensi: pendidikan, kesehatan dan standard hidup.

Peran tradisional laki-laki yang bersifat patriarkis dan chauvinis, -dimana peran laki-laki tertua dianggap sebagai yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan terbaik, telah mengalami transformasi yang cukup drastis baik di dalam maupun diluar sistem keluarga, di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali di daerah pedesaan di Indonesia.

Adapun karena keterbatasan waktu dan tempat, paper ini lebih difokuskan untuk melihat bagaimana pola pengambilan keputusan dalam keluarga yang mungkin telah mempengaruhi keputusan perempuan untuk mencari penghidupan di luar desa. Di akhir paper ini akan diberikan rekomendasi yang juga terkait kebijakan dan regulasi pemerintah untuk membuat desa kembali menjadi tempat yang menarik untuk bekerja bagi penduduknya.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui Survey Rumah tangga Beragam-Topik (*Multi-Topic Household Survey*). Metode ini sering disebut sebagai Survey Pengukuran Standar Hidup atau *Living Standards Measurement Survey* (LSMS) yang adalah suatu cara pengumpulan data mengenai berbagai aspek standar hidup secara terintegrasi, seperti pengeluaran, komposisi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fertilitas, gizi, tabungan, kegiatan pertanian dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui *review* dokumen, pengamatan langsung, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus dan dokumentasi gambar maupun gambar bergerak.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengumpulkan dan memberikan gambaran yang komprehensif, akurat dan terkini tentang kondisi sosio-ekonomi-kesehatan masyarakat di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi yang didapatkan digunakan sebagai masukan awal (*baseline information*) bagi sebuah lembaga pengabdian masyarakat di sebuah universitas swasta di Jawa Timur dalam mendisain program pengembangan komunitas mereka. Ada empat indikator utama yang dibahas dalam temuan penelitian yaitu 1) indikator mata pencaharian dan ekonomi; 2) sosial budaya dan kemasyarakatan; 3) karakteristik keluarga dan individu; dan 4) kesehatan dan sanitasi.

Dalam paper ini hanya sebagian dari temuan penelitian yang akan didiskusikan, terutama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan indikator karakteristik keluarga dan individu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang: (a) pencari nafkah utama (b) pola pengambilan keputusan dalam keluarga (c) sumber informasi utama bagi keluarga (d) pemberian prioritas dalam keluarga.

Penelitian dilakukan pada akhir tahun 2011 di lima desa di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, dengan jumlah responden sebanyak 350 orang, yang dipilih dengan teknik *multi-stage cluster sampling*. Metode pengambilan sampel ini, walaupun menghasilkan marjin kesalahan survei yang lebih tinggi dari pada metode acak sederhana, namun masih masuk dalam kategori pengambilan sampel yang probabilistik sehingga hasilnya masih cukup valid untuk dilakukan generalisasi melalui analisis deskriptif atas hasil survei.

Konteks wilayah studi

Kecamatan Pesanggaran terletak di sebelah barat daya Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah penduduk sebanyak 48.225 jiwa (23.886 laki-laki dan 24.339 perempuan)⁴. Kecamatan ini terdiri dari 5 desa, 15 dusun, 64 RW dan 282 RT. Kecamatan Pesanggaran terdiri dari 5 desa yaitu Desa Pesanggaran, Sumbermulyo, Sumberagung, Kandangan dan Sarongan, 15 dusun, 64 RW dan 282 RT. Empat dari lima desa di kecamatan ini, kecuali Sumbermulyo, memiliki garis pantai yang langsung menghadap ke pantai Laut Selatan Jawa. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Mayoritas masyarakat adalah petani, buruh tani (baik yang bekerja sebagai buruh di sawah/kebun orang lain maupun buruh sadap karet dan gula merah di kebun milik orang lain), maupun pekerja di sektor perikanan (yang terdiri dari nelayan dan buruh nelayan) yang kebanyakan bertempat tinggal di Desa Sumberagung. Hanya sedikit diantara penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian seperti sebagai wiraswasta, pedagang, pekerja kantor pemerintah/ swasta, sopir, buruh lepas serabutan, dan sebagainya.

Situasi di Pesanggaran mewakili potret kemiskinan masyarakat perdesaan yang hidup dari pertanian di Indonesia dan Pulau Jawa pada umumnya, yang memiliki lahan terbatas, menghadapi ketidakpastian harga, iklim dan hama penyakit dengan pendapatan, daya beli serta kualitas kesehatan yang cukup rendah. Proporsi KK miskin yang sangat tinggi, rata-rata diatas 20% bahkan ada yang mencapai hampir 43% -lebih mendekati angka kemiskinan di wilayah-wilayah timur Indonesia daripada di Jawa umumnya, menunjukkan bahwa pertanian tidak lagi bisa diandalkan untuk bisa hidup layak.

Makin sedikitnya peluang kerja yang berbasis tanah maupun laut, apalagi bagi mereka yang berpendidikan menengah ke atas menjadi salah satu faktor pendorong warga desa yang berumur produktif untuk bermigrasi keluar sehingga makin banyak desa yang lebih banyak dihuni oleh penduduk berusia diatas 40 tahun.

Tabel 3

Proporsi KK Miskin di Kecamatan Pesanggaran

Desa	Jumlah penduduk	Jumlah KK	KK Miskin		Jumlah TKI
			Jumlah	Persentase	
Pesanggaran	14,589	3,444	986	28.63%	109
Sumberagung	13,232	4,115	984	23.91%	172
Sumbermulyo	6,210	2,236	310	13.86%	125
Sarongan	5,750	1,441	550	38.17%	30
Kandangan	9,819	2,760	1178	42.68%	101
	49,600	13,996	4,008	28.64%	

Sumber: diolah dari Monografi Desa

Tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi oleh tingkat sekolah menengah, sedangkan untuk yang berumur 40 tahun keatas kebanyakan hanya tamatan SD. Menurut beberapa responden, dulu warga tamatan SMP biasanya bisa langsung berangkat ke luar negeri sebagai TKI (kebanyakan perempuan), namun karena sekarang syarat untuk menjadi TKI harus tamatan SMA, banyak warga yang menamatkan sekolahnya sampai tingkat SMA. Cukup mengesankan, karena dengan demikian bisa dikatakan bahwa motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA ialah untuk menjadi TKI. Saat ini menurut pengakuan pimpinan desa dan warga, cukup jarang penduduk usia muda (20–25 tahun) yang masih tinggal di desa

⁴ Ada selisih antara jumlah penduduk berdasarkan data BPS dan Monografi Desa dalam Tabel 3

karena kebanyakan berangkat ke luar desa untuk mencari pekerjaan lain atau ke luar negeri untuk menjadi TKI.

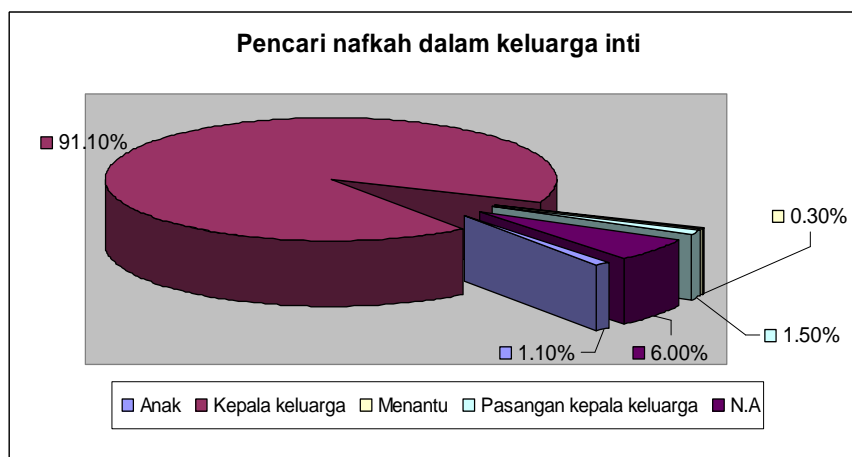
Temuan dan analisis

Pencari nafkah utama

Lebih dari 90% dari pencari nafkah utama di keluarga responden adalah kepala keluarga yang mayoritas adalah laki-laki, dan kurang dari 10% adalah pasangannya, yaitu perempuan (Grafik 1). Hasil ini tidak berbeda jauh dengan data BPS untuk tingkat nasional, dimana 85% dari pencari nafkah utama adalah kepala keluarga laki-laki dan 15% kepala keluarga perempuan.

Namun demikian cukup banyak pula KK yang terdiri dari orang tua yang tidak produktif secara ekonomis, yang mengharapkan kiriman dari keluarganya yang bekerja di luar Jawa atau di luar negeri. Orang-orang tua semacam ini umumnya tinggal dengan anak atau saudara yang membantu mengurus mereka, termasuk mengurus mengambil kiriman uang dari anak mereka.

Grafik 1
Komposisi pencari nafkah utama dalam keluarga



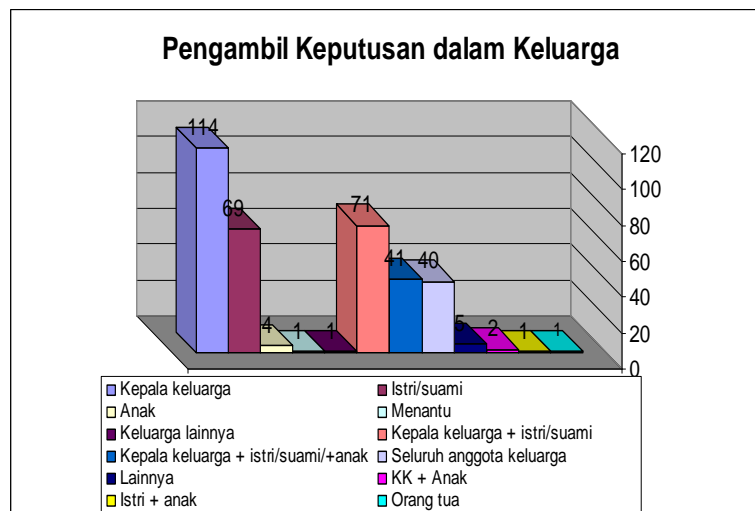
Ketergantungan kepada kepala keluarga dan kurangnya alternatif penghasilan tambahan (umumnya pilihan lain bagi pasangan ialah dengan membuka kios yang menjual keperluan sehari-hari, atau bensin misalnya) membuat anggota keluarga harus merantau jika kebutuhan hidup meningkat. Alternatif lain adalah berhutang sampai musim panen berikutnya, karena musim panen tidak bersamaan dengan musim dimana keluarga petani membutuhkan banyak uang yaitu bulan-bulan kenaikan kelas dan tahun ajaran baru. Ketiadaan tabungan ataupun jaminan yang bisa diandalkan pada saat krisis keuangan seperti ini membuat masyarakat terjatuh hutang dan tidak bisa mengembangkan usaha taninya.

Pola pengambilan keputusan dalam keluarga.

Dalam hal proses pengambilan keputusan, survei ini mengindikasikan bahwa peranan kepala keluarga (yang umumnya laki-laki) masih yang paling penting bagi keluarga (32,6%), sedangkan 19,7% menyebutkan bahwa pasangannya yang berperan penting dalam

mengambil keputusan dikeluarga. Lebih dari seperlima responden menyatakan bahwa mereka melakukannya bersama-sama dengan pasangannya (lihat Grafik 2).

Grafik 2



Walaupun tidak dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga sudah tidak lagi menjadi masalah, namun hasil ini cukup menunjukkan bahwa secara mikro, masyarakat di daerah pedesaan seperti ini sudah mulai melakukan pengambilan keputusan penting secara lebih seimbang, antara suami dan istri maupun secara kolektif (total gabungan hampir 40%).

Sumber informasi utama bagi keluarga.

Sebagaimana dikemukakan di atas, orientasi kehidupan masyarakat di Pesanggaran adalah kepada keluarga, begitu juga dengan sumber informasi utama (64,3%) bagi mereka dalam hal pekerjaan atau pendidikan/kesehatan (Tabel 4). Tetangga (17,1%) dan teman (6,3%) adalah pihak lain yang sering menjadi sumber informasi.

Yang menarik ialah bahwa televisi menjadi salah satu sumber informasi penting (4%) bagi masyarakat di Kecamatan Pesanggaran, sedikit lebih penting daripada lembaga desa (3,7%). Peran media (misalnya televisi) dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang sedang hangat memang cukup signifikan. Ini dikonfirmasi saat dilakukan FGD di beberapa desa, dimana masyarakat menyebutkan kebijakan impor sapi dari Australia (yang pada tahun 2010 ramai diberitakan di televisi), sebagai penyebab anjloknya harga ternak sapi di desa mereka.

Ketergantungan akan media/televisi sebagai sumber informasi semakin tinggi dengan semakin terisolasi-nya suatu desa dan semakin jauh jaraknya dari pusat pemerintahan. Ini terjadi di Desa Sarongan dan Kandungan yang infrastruktur jalannya paling buruk dan berjarak paling jauh dari ibukota kecamatan.

Tabel 4
Sumber informasi utama dalam hal pekerjaan/kesehatan/pekerjaan

Sumber Informasi utama	Jumlah responden	Persentase (%)
Keluarga	225	64.3
Tetangga	60	17.1
Teman	22	6.3
Pemuka Masyarakat	4	1.1
Lembaga desa	13	3.7
Pemuka agama	3	0.9
Televisi	14	4.0
Lainya	2	0.6
Mitra kerja/kantor	2	0.6
Sendiri	1	0.3
Tidak menjawab	4	1.1
Total	350	100.0

Dalam komunitas desa yang kerapatan sosialnya masih tinggi, masyarakat menyandarkan harapan pada lingkup lingkaran sosial yang relatif kecil yaitu keluarga, teman dan tetangga sebagai sumber informasi. Jika hasil ini di-*cross check* dengan data mengenai rendahnya ekspos responden, -terutama yang menganggap dirinya miskin/berkekurangan, dalam acara-acara publik non-keluarga, maka nampak bahwa jalan menuju inklusi sosial bagi masyarakat miskin masih cukup panjang. Seorang ibu responden survei misalnya, mengatakan bahwa ia segan menghadiri acara-acara di desa dimana “banyak orang kaya hadir”, karena malu dengan pakaiannya yang “itu-itu saja”, dan juga sungkan karena “...nanti dikira mau *minjem* uang”.

Pemberian prioritas dalam keluarga.

Walaupun tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal pendidikan, kesehatan dan penggunaan aset, namun penting untuk dicatat bahwa secara umum sekitar 25% dari responden memprioritaskan anggota keluarga laki-laki dalam hal pekerjaan (lihat Grafik 1). Jika dipilah menurut jenis kelamin responden, baik responden laki-laki maupun perempuan mengutamakan anggota keluarga laki-laki dalam hal pekerjaan, dan perempuan dalam hal kesehatan.

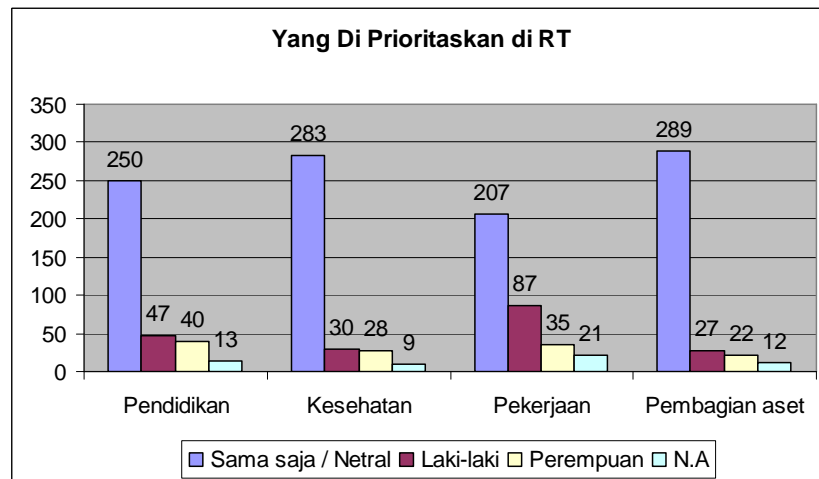
Ini menunjukkan bahwa laki-laki masih cenderung diposisikan sebagai '*breadwinner*' atau pencari nafkah utama, sedangkan perempuan terutama diposisikan sebagai kelompok yang lebih rentan dan sebagai tulang punggung keluarga dalam hal pengaturan hal-hal domestik sehingga harus diutamakan kesehatannya, selain juga fakta bahwa perempuan ditempatkan sebagai carer dari seluruh anggota keluarga (fungsi sebagai perawat dalam keluarga).

Salah satu akibat dari prioritas laki-laki dalam pekerjaan ialah banyaknya tenaga kerja perempuan yang memilih menjadi TKI di luar negeri dan mendapatkan alternatif pendapatan lain dibandingkan jika hanya tinggal di desa dan menganggur karena sulitnya lapangan kerja. Para TKI ini umumnya menjadi pembantu rumah tangga di negara-negara seperti Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia dan Arab Saudi.

Menurut responden, umumnya para TKI dari Kecamatan Pesanggaran “bernasib baik, tidak disiksa seperti yang banyak diberitakan di TV”. Namun demikian, masyarakat masih melihat

bahwa menjadi TKW tidak hanya mendatangkan remitansi bagi keluarga dan masyarakat desa, melainkan juga mempunyai dampak negatif akibat durasi migrasi yang lama tersebut, yaitu tingginya angka perceraian (hasil FGD di Desa Sumbermulyo).

Grafik 3
Prioritas dalam Rumah Tangga



Survei di Desa Sumberagung malah menunjukkan bahwa siapa saja bisa diutamakan sebagai prioritas dalam hal akses kepada pendidikan, pekerjaan dan kesehatan serta pembagian aset bagi anggota keluarga. Kebanyakan responden (lebih dari separuh dari 76 total responden) memilih untuk tidak mengutamakan laki-laki maupun perempuan, dan lebih ditekankan dari sisi kebutuhannya. Ketika ditanya mengapa demikian, beberapa responden menjawab bahwa jaman ini sudah tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kepintaran di sekolah maupun dalam hal mencari uang.

Namun demikian, saat digali lebih lanjut, tanggapan responden di desa ini umumnya justru menunjukkan bahwa mereka masih sedikit lebih mengutamakan perempuan dalam hal pendidikan (17,80% untuk perempuan dibanding 12,30% untuk laki-laki), kesehatan (20,50% untuk perempuan dibanding 9,60% untuk laki-laki) dan pembagian aset (6,80% untuk perempuan dibanding 5,50% untuk laki-laki). Hal yang berbeda hanyalah untuk akses kepada pekerjaan, dimana laki-laki lebih diprioritaskan, dengan tingkat preferensi untuk laki-laki hampir tiga kali lipat untuk perempuan (38,40% dibanding 12,30%).

Ini menunjukkan bahwa masih ada sedikit preferensi bagi laki-laki untuk lebih dahulu mendapatkan pekerjaan, karena pandangan tradisional bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab menghidupi keluarganya, sedangkan perempuan boleh tidak bekerja (atau bekerja tanpa dibayar) karena merupakan menjadi tanggungan suaminya.

Di beberapa keluarga responden yang disurvei yang memiliki beberapa anak perempuan misalnya, setelah tamat SMA, mereka umumnya hanya tinggal di rumah sambil menunggu informasi untuk menjadi TKI, atau menunggu untuk menikah.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- Pandangan masyarakat di daerah pedesaan, terutama pada level mikro yaitu internal-rumah tangga mengenai peran gender sudah mengalami transformasi ke arah yang lebih

setara. Kepala keluarga (yang umumnya laki-laki) masih berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, namun jika digabung antara responden yang mengatakan bahwa pasangannya (perempuan) dan seluruh anggota keluarga selalu diajak berembuk untuk mengambil keputusan secara kolektif, jumlah yang terakhir masih lebih banyak.

- Pemberian prioritas pada anggota keluarga dilakukan dengan dasar pertimbangan kebutuhan, dan bukan faktor jenis kelamin maupun umur anggota keluarga. Bahkan hasil survei di beberapa desa menunjukkan bahwa untuk preferensi pemberian prioritas pada aspek kesehatan dan pendidikan, perempuan lebih diutamakan. Laki-laki diutamakan untuk pemberian prioritas dalam hal pekerjaan. Karena terbatasnya lapangan kerja di desa, pilihan perempuan untuk bekerja tidak banyak, selain mempersiapkan diri untuk menjadi TKI atau menikah dan menjadi tanggungan suami.
- Masyarakat desa, terutama yang miskin, dan juga perempuan, masih perlu didorong untuk terekspos pada ranah publik, karena lingkaran sosial yang sangat terbatas membuat mereka tidak percaya diri untuk keluar dari lingkungan keluarga, teman dan tetangga saja. Pemberian tanggungjawab dalam acara-acara kampung misalnya, bisa menjadi contoh *affirmative action* oleh pemerintahan desa. Jika tidak, *social exclusion* yang dialami oleh masyarakat miskin dan perempuan miskin akan semakin dalam.
- Pentingnya peningkatan investasi pemerintah untuk riset dan pengembangan pertanian skala kecil dan peningkatan efektifitas peran petugas penyuluh lapangan (PPL) sebagai penyalur informasi dan pengetahuan yang konstruktif kepada masyarakat, tidak hanya untuk kegiatan pertanian yang utama namun juga sampingan seperti kebun sayur yang dirawat oleh umumnya perempuan di desa.
- Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja masyarakat berpendapatan rendah agar mereka mendapatkan upah di atas garis kemiskinan, baik *in-farm* maupun *off-farm*. Pengawasan juga dilakukan untuk standar pengupahan sehingga ada jaminan bahwa bekerja di sektor pertanian cukup kompetitif untuk penghidupan. Jika lapangan kerja semacam ini makin tersedia, kompetisi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan makin berkurang sehingga berpotensi mengurangi mengalirnya tenaga kerja produktif ke luar desa. Berbagai studi menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan pekerja di sektor pertanian pedesaan berpengaruh mempunyai daya ungkit yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional (karena serapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 40%). Dengan lambatnya penurunan angka kemiskinan nasional beberapa tahun ini, anggaran penanggulangan kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahun itu seharusnya bisa dibelanjakan untuk program-program yang bisa berdampak lebih luas semacam ini.
- Memastikan kecukupan alokasi penanggulangan kemiskinan untuk kesehatan dan pendidikan dasar seperti PKH sebagai mekanisme perlindungan sosial bagi KK Miskin, serta perlindungan usaha untuk sektor pertanian dan perikanan. Saat ini anggaran untuk program perlindungan sosial seperti PKH baru meng-cover 2,4 juta keluarga miskin pada tahun 2013. Sedangkan skema asuransi pertanian baru diujicobakan pada 3000 hektar lahan sawah di 3 provinsi pada musim tanam Oktober 2012-Maret 2013, jumlah yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total luas lahan pertanian di Indonesia.

---END---

Bibliografi:

- Alkire, Sabina & Maria Emma Santos (2010), "Indonesia Country Briefing. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Multidimensional Poverty Index Country Briefing Series" diakses dari: www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/mpi-country-briefings/ pada 9 April 2013
- Arif, Sirojuddin, Muhammad Syukri, Rebecca Holmes and Vita Febriany (2010), "Gendered risks, poverty and vulnerability: Case study of the *Raskin* food subsidy programme in Indonesia", Overseas Development Institute and SMERU Research Institute.
- Bieri, Sabin and Annemarie Sancar (2009), "Power and poverty: Reducing gender inequality by ways of rural employment?" Interdisciplinary Centre for Gender Studies, Switzerland Swiss Development Agency, Switzerland.
- Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai data sosial dan kependudukan, diakses dari <http://www.bps.go.id/> pada 10 April 2013
- FIELD (2010), "Studi kasus Indramayu: pertanian, perempuan dan pekerja migrant", diakses dari <http://www.field-indonesia.org/> pada 4 April 2013
- IPC (2003), "The macroeconomic of poverty reduction in Indonesia", diakses dari <http://www.ipc-undp.org/publications/reports/Indonesia.pdf> pada 5 April 2013.
- Rashid1, M.U dan M. M. Islam (2011), "Women's Participation in Family Decision Making in Dumki Upazila of Patuakhali District", *The Agriculturists* 9(1&2): 137-142(2011)
- Schech, Susanne dan Mochamad Mustafa (2010), The Politics of Gender Mainstreaming Poverty Reduction: An Indonesian Case Study, *Social Politics* 2010 Vol. 17 Number 1 pp 111-135
- Silvey, Rachel dan Rebecca Elmhirst (2003), "Engendering Social Capital: Women Workers and Rural-Urban Networks in Indonesia's Crisis", *World Development* Vol. 31, No. 5, pp. 865-879
- Thieme, Susan dan Karin Astrid Siegmann (2010), "Coping on Women's Backs: Social Capital-Vulnerability Links through a Gender Lens", *Current Sociology* Sept 2010 Vol. 58(5) pp 715-737